

**LEMBAR JAWABAN  
ANALISIS KASUS**

Nomor Assessee : 03

Nama Assessee : VERY SANJAYA

Tanggal : 9 FEBRUARI 2022

Dalam situasi seperti ini, bocornya data pribadi kependudukan seperti yang pernah dialami oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjadi pelajaran kita semua, ternyata data pribadi kependudukan yang sudah selayaknya menjadi rahasia masih bisa dibobol oleh orang lain melalui jaringan internet. Untuk itu sebagai seorang pegawai pemerintahan wajib melindungi kerahasiaan data penduduk agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Sebagai petugas administrasi kependudukan dituntut memiliki IT yang handal untuk melindungi rahasia data kependudukan, untuk itu setiap KK (Kartu Keluarga) harus memiliki poswoord atau QR kode tertentu untuk membuka data keluarga tersebut. Dan kode inilah yang menjadi rahasia petugas untuk melindungi dan menjaga kerahasiaan data penduduk. Selain itu petugas yang ditugaskan harus orang-orang yang berbeda. Petugas yang menjaga data per KK harus berbeda dengan petugas yang menjaga file kependudukan secara keseluruhan. Untuk masuk ke file data penduduk petugas wajib memiliki poswoord dan QR tersendiri, kalau perlu setiap Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, sampai setingkat RT memiliki kode poswoord dan QR tersendiri untuk memudahkan mencari data kependudukan. Selain itu petugas yang bertugas menjaga data KK dan file kependudukan secara keseluruhan memiliki kode rahasia masing-masing dan wajib untuk menjaganya dan tidak membocorkannya pada petugas lain.

Dengan demikian saya optimis dengan kode poswoord dan QR berlapis seperti ini kerahasiaan data penduduk dapat dilindungi.

Demikian saran dan masukan yang dapat saya berikan dalam permasalahan ini, sekali lagi data kependudukan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melindungi kerahasiaannya, karena sangat fatal akibatnya apabila data kependudukan dibobol oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

